



**PENGARUH IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA TERHADAP
LAPORAN KEUANGAN BUMDES DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

***The Effect of Implementation Of Governance Principles On Bumdes
Financial Reports In Kuantan Singingi Regency***

Piges Nelpion¹, Enni Savitri², Volta Diyanto³, Mudrika Alamsyah Hasan⁴

¹²³⁴Universitas Riau

Email: pigesnelpion99@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the effect of accountability, transparency, responsibility, professionalism, rule of law on financial statements. The population in this study were 208 BUMDes located in Kuantan Singingi Regency in 2020. Respondents are 1) Chairman / Head of BUMDes. 2) Head of finance of BUMDes. 3) Expenditure treasurer. The sample used was 65 BUMDes, namely a total of 195 respondents. The data collection method uses the Proposive Sampling method. The analysis method uses multiple linear regression models. The results of this study indicate that Accountability has a positive effect on BUMDes Financial Reports, the application of bumdes accountability provides financial management that is presented openly, quickly, and precisely. so that the government's goal of reporting good financial report results is achieved. Transparency has a positive effect on BUMDes Financial Statements, being able to provide information that the public needs in a relevant, accurate, timely and reliable manner. Responsibility has a positive effect on BUMDes Financial Statements, a high level of responsiveness from the organization will lead to trust from external parties. Professionalism has a positive effect on BUMDes Financial Statements, the ability of a competent person can really be utilized optimally for the benefit of the organization. The existence of the rule of law can direct government duties and functions in an orderly manner.

Keywords: Accountability; Transparency; Responsibility; Professionalism; Rule Of Law and Financial Statements.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisa pengaruh akuntabilitas, transparansi, responsibilitas, profesionalisme, *rule of law* terhadap Laporan Keuangan. Populasi dalam penelitian ini adalah 208 BUMDes yang berada pada di Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2020. Responden adalah 1) Ketua/Pimpinan BUMDes. 2) Kepala bidang keuangan BUMDes. 3) Bendahara pengeluaran. Sampel yang dipakai sebanyak 65 BUMDes yakni jumlah keseluruhan 195 responden. Metode pengumpulan data menggunakan

metode *Proposive Sampling*. Metode analisis menggunakan model regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Laporan Keuangan BUMDes, penerapan akuntabilitas bumdes memberikan pengelolaan keuangan yang disajikan secara terbuka, cepat, dan tepat. sehingga sasaran pemerintah untuk melaporkan hasil laporan keuangan yang baik tercapai. Transparansi berpengaruh positif terhadap Laporan Keuangan BUMDes, mampu menyediakan informasi yang di perlukan masyarakat secara relevan, akurat, tepat waktu dan dapat dipercaya. Responsibilitas berpengaruh positif terhadap Laporan Keuangan BUMDes, tingginya tingkat responsive dari pihak organisasi akan menimbulkan sifat percaya dari pihak eksternal. Profesionalisme berpengaruh positif terhadap Laporan Keuangan BUMDes, kemampuan seseorang yang kompeten benar-benar dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan organisasi. Adanya *rule of law* dapat mengarahkan tugas dan fungsi pemerintah secara teratur.

Kata Kunci: Akuntabilitas; Transparansi; Responsibilitas; Profesionalisme; *Rule Of Law* dan Laporan Keuangan.

PENDAHULUAN

Laporan keuangan merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan. BUMDes merupakan instrumen untuk memanfaatkan ekonomi lokal dengan berbagai jenis potensi. Pemanfaatan potensi tersebut terutama ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi Warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi. Perlu memaksimalkan peran BUMDes untuk peningkatan Pendapatan Asli Desa. BUMDes juga wajib memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMDes kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa yang sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun.

Fenomena mengenai pengelolaan dana Bumdes banyak sekali ditemukan kasus kecurangan seperti dugaan penyelewengan dana maupun penyalahgunaan uang yang sengaja dilakukan oleh individu-individu yang tidak konsekuen guna mendapatkan keuntungan untuk konsumsi pribadinya. Hal ini terjadi karena ketidakefisien dalam pengelolaan dana desa yang berdampak pemborosan anggaran. Seperti yang telah terjadi pengelapan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (DD) Tahun 2017 dan 2018, sehingga berpotensi merugikan keuangan Negara. Inspektorat Kabupaten Kuansing, Riau sudah memanggil terlapor terkait dugaan penyelewengan dana pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dana BUMDes yang diduga diselewengkan tersebut merupakan bantuan keuangan

tahun 2020 lalu.¹ Tim Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Klungkung melakukan penggeledahan Kantor Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kasus dugaan tindak pidana penyalahgunaan dana terungkap setelah adanya laporan masyarakat Agustus 2021. Bendahara Bumdes BUMDes menjadi Tersangka Korupsi Rp 650 Juta Kredit Fiktif.²

Faktor pertama yang mempengaruhi laporan keuangan BUMDes adalah Akuntabilitas. Untuk terwujudnya transparansi dan akuntabilitas harus didukung dengan adanya sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan yang baik agar dapat menghasilkan informasi yang relevan. Kepala desa bertanggung jawab atas penggunaan dan pelaporan dana desa yang diberikan pemerintah ini. Akuntabilitas merupakan wujud dari tata kelola yang baik dalam organisasi pelayanan masyarakat. Akuntabilitas akan semakin baik jika dalam pengelolaan laporan keuangan dilaksanakan secara Akuntabel dan Transparan. Akuntabilitas dalam pemerintahan sangat penting untuk diterapkan sebagai penunjang penerapan otonomi desa agar dapat berjalan dengan baik. Penelitian Ismail menunjukkan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan anggaran BUMDes. Penelitian Anggraini menyatakan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pengelolaan anggaran BUMDes.

Transparansi merupakan salah satu aspek dasar dalam terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.³ Transparansi dibutuhkan dalam pengelolaan BUMDes sebagai alat untuk mendorong keterbukaan atas laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah desa, agar masyarakat desa dapat mengetahui dan mengakses dengan mudah pengelolaan dana yang telah diberikan. Transparansi dapat dilihat dengan kebijakan, regulasi, program, dan anggaran serta kegiatan yang dilakukan pemerintah terbuka pada masyarakat.⁴ Dalam pengelolaan keuangan desa harus transparansi. Sehingga organisasi secara terbuka menyediakan informasi yang material dan relevan serta mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Penelitian Ultrafiah dan Umami menyimpulkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan anggaran BUMDes. Penelitian Ismail, menunjukkan transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan BUMDes.

¹ Robi Susanto, "Inspektorat Kuansing Dalam Dugaan Penyelewengan Dana BUMDes Petapahan," *Riau Online*, last modified 2021, accessed March 15, 2023, <https://www.riauonline.co.id/rantau-kuantan/read/2021/07/22/inspektorat-kuansing-dalami-dugaan-penyelewengan-dana-bumdes-petapahan>.

² KompasTV Dewata, "Kejari Klungkung Geledah Kantor Bumdes Desa Dawan Kaler," *Kompas TV*, last modified 2023, accessed March 13, 2023, <https://www.kompas.tv/article/386090/kejari-klungkung-geledah-kantor-bumdes-desa-dawan-kaler>.

³ Reza M. Zulkarnaen, "Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta," *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat* 5, no. 1 (2016): 1-4.

⁴ Brian Syah Putra, "BUMDes AL-Madani Dalam Perspektif Modal Sosial James S.Coleman (Penelitian Tentang Pengembangan Perekonomian Desa)" (Thesis, Universitas Airlangga, 2018).

Responsibilitas merupakan hal yang dipertanggung jawabkan atas suatu kewajiban dan termasuk putusan, keahlian, kemampuan, dan kecakapan. Kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang ditimbulkan. Jadi, prinsip tanggung jawab dalam arti responsibilitas lebih menekankan pada suatu perbuatan yang harus atau wajib dilakukan secara sadar dan siap untuk menanggung segala resiko yang didasarkan atas moral tersebut. Berdasarkan Penelitian Utama & Setiyani menunjukkan bahwa responsibilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan. Penelitian Abdullah menunjukkan bahwa responsibilitas tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan.

Profesionalisme merupakan sikap seseorang yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan dengan baik serta dilandasi dengan tingkat pengetahuan yang memadai dalam melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan bidangnya. Pembuatan laporan keuangan sangat di butuhkan SDM yang berkualitas, berpendidikan, dan keahlian. sikap profesionalisme sangat berperan penting dalam pemeriksaan laporan keuangan. Menurut Sedarmayanti Profesionalisme merupakan pilar yang akan menempatkan birokrasi sebagai mesin efektif bagi pemerintah dan sebagai parameter kecakapan aparatur dalam bekerja secara baik. Berdasarkan penelitian Mahardika dkk⁵ menunjukkan hasil bahwa profesionalisme berpengaruh terhadap laporan keuangan. Namun penelitian Agusti & Pertiwi menunjukkan bahwa profesionalisme tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Faktor terakhir yaitu *Rule of law*. *Rule of law* merupakan penyelenggaraan kekuasaan harus sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Setiap lembaga pemerintah dan lembaga lainnya yang ada didalam negara tersebut dalam menjalankan tugasnya harus dilandasi hukum dan dapat di pertanggung jawabkan secara hukum. Menurut Hartono menyatakan *rule of law* merupakan jaminan apa yang disebut sebagai keadilan sosial. Penelitian yang dilakukan oleh Pribadi⁶ dan Purboraras⁷ yang juga menyatakan bahwa kepatuhan akan peraturan Undang-Undang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun penelitian Sofyani dkk & Azmal menyatakan bahwa prinsip *rule of law* tidak berpengaruh terhadap kinerja

⁵ Made Herman Mahardika, Nyoman Trisna Herawati, and I Made Pradana Adiputra, "Pengaruh Profesionalisme, Pengalaman Kerja, Keahlian Audit, Independensi, Dan Etika Pemeriksa Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan (Studi Empiris Pada Inspektorat Kabupaten Karangasem Dan Kabupaten Bandung)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi* 3, no. 1 (2015).

⁶ Arief Pribadi, "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandung)" (Skripsi, Universitas Widyatama, 2015).

⁷ Sella Antika Purboraras, "Pengaruh Kepatuhan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan SIA Keuangan Daerah, Pelatihan Dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Organisasi Pemerintah Daerah Di Kabupaten Blitar)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 7, no. 2 (2019): 1-11.

BUMDes. Keterbaruan penelitian ini ada penambahan variabel indenpenden yaitu: *Responsibilitas*, *Profesionalisme*, dan *Rule of Law*. Penelitian ini menganalisa pengaruh pengaruh akuntabilitas, transparansi, *responsibilitas*, *profesionalisme*, *rule of law* terhadap laporan keuangan BUMDES di Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana yang memberikan tambahan informasi dalam pengelolaan laporan keuangan BUMDES dan tata kelola organisasi yang baik. Serta dapat menambah wacana dan referensi di bidang akuntansi, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan laporan keuangan BUMDES

TINJAUAN PUSTAKA

Teori *Stewardship* (Penata Layanan)

Stewardship Theory adalah teori yang dikemukakan oleh Donaldson & Davis Teori ini menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan *principal*. Selain itu perilaku *steward* tidak akan meninggalkan organisasinya sebab *steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya. Teori ini didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi dimana para eksekutif dalam perusahaan sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik pada *principal* nya.

Teori Keagenan (Agency Theory)

Jensen & Meckling memandang bahwa teori keagenan merupakan suatu model kontraktual antara *principal* dan *agent*. Hubungan keagenan dalam teori agensi adalah perjanjian satu atau banyak pihak untuk menjalankan suatu kepentingan, pihak *principal* yang melakukan perjanjian dengan pihak *agent* untuk menjalankan suatu aktivitas. Teori keagenan adalah suatu teori yang menjadi sebuah dasar untuk suatu usaha menjalankan bisnis. Dalam teori agensi terdapat pemisahan pengelolaan perusahaan yang diberikan kepada *agent* dan *principal* hanya bertugas mengawasi dan memonitor jalannya perusahaan.

Laporan Keuangan BUMDES

Diamond penyajian laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting, pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi dan akuntabilitas. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksitransaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Akuntabilitas

Akuntabilitas menurut Mardiasmo adalah: Sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Akuntabilitas merupakan wujud dari tata kelola yang baik (*good governance*) dalam suatu organisasi pelayanan masyarakat. Bentuk pertanggungjawaban direalisasikan dalam bentuk laporan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, hingga pertanggungjawaban guna menjaga kepercayaan masyarakat dan menjaga eksistensi badan usaha sehingga diukur sejauh mana keberhasilan akurasi akuntabilitas organisasi pelayanan masyarakat. menyatakan Akuntabilitas atau pertanggungjawaban merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat.

Transparansi

Transparansi merupakan salah satu karakteristik dari *Good Corporate Governance*. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berlaku dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh mereka yang membutuhkan. Transparansi merupakan salah satu aspek dasar dalam terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Terdapat keterbukaan, keterlibatan, serta kemudahan akses untuk masyarakat atas proses jalannya pemerintah merupakan suatu terwujudnya tata pemerintah yang baik. Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Standar Akuntansi Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005,) Transparansi di sini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak.

Responsibilitas

Menurut Azhery responsibilitas adalah hal yang dipertanggung jawabkan atas suatu kewajiban dan termasuk putusan, keahlian, kemampuan, dan kecakapan. Kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang ditimbulkan. Responsibility merupakan istilah baru

dalam sebuah etika, sedangkan Lenvine menyatakan bahwa *Responsibility* ialah berdasarkan pelaksanaan kegiatan oleh organisasi publik sesuai standar yang telah ditetapkan baik itu secara eksplisit atau empiris. Dwiyanto menyatakan bahwa *Responsibility* merupakan standar untuk mengukur kualitas dari pelayanan yang diberikan publik kepada masyarakat.

Professionalisme

Profesionalisme merupakan sikap seseorang yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan dengan baik serta dilandasi dengan tingkat pengetahuan yang memadai dalam melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan bidangnya. Salah satu syarat utama yang harus dimiliki seorang auditor dalam menjalankan tugasnya adalah mempertahankan sikap profesionalisme. Profesionalisme adalah pilar yang akan menempatkan birokrasi sebagai mesin efektif bagi pemerintah dan sebagai parameter kecakapan aparatur dalam bekerja secara baik.

Rule Of Law

Rule of law merupakan penyelenggaraan kekuasaan harus sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Artinya setiap lembaga pemerintah dan lembaga lainnya yang ada didalam negara tersebut dalam menjalankan tugasnya harus dilandasi hukum dan dapat di pertanggung jawabkan secara hukum. *Rule of law* atau aturan hukum pada hakekatnya adalah memposisikan hukum sebagai landasan bertindak dari seluruh elemen bangsa dalam sebuah negara. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya pemerintah mengacu pada aturan hukum atau perundang-undangan.

KERANGKA PEMIKIRAN DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh Akuntabilitas terhadap laporan keuangan BUMDES

Akuntabilitas menurut Mahmudi adalah kewajiban agen untuk mengelola sumber daya, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada prinsipal. Teori keagenan ini menjelaskan hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principals*) mempekerjakan orang lain (*agents*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agents* tersebut. Hubungan antara *principals* dan *agents* dapat mengarah pada kondisi ketidakseimbangan informasi. Agen berada pada posisi yang memiliki informasi yang lebih banyak tentang perusahaan dibandingkan dengan *principals*, dengan asumsi bahwa individu-individu bertindak untuk memaksimalkan kepentingan diri sendiri. Informasi asimetri yang dimilikinya akan mendorong *agents* untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui *principal*. Konflik keagenan tersebut bisa diatasi dengan adanya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan alokasi dana desa dikarenakan semua aktivitas agen dalam hal ini perangkat desa dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak pemberi amanah (*principals*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Berdasarkan penelitian Umami, Fadil

dan Kusumawati menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap laporan keuangan BUMDES.

Menurut penjelasan di atas maka hipotesis berikut ini.

H1: Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap laporan keuangan BUMDES

Pengaruh Transparansi terhadap laporan keuangan BUMDES

Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.⁸ Konflik keagenan tersebut bisa diatasi dengan adanya transparansi dalam laporan keuangan BUMDes dikarenakan semua aktivitas agen dalam hal ini perangkat desa dapat dilakukan secara terbuka dan transparan sehingga semua pihak yang berkaitan mengetahui aktivitas laporan keuangan BUMDes. Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Jadi dengan transparansi yang baik maka dalam laporan keuangan BUMDes akan baik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Maslika dkk., Anggraini dan Wandika menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap laporan keuangan BUMDES.

Menurut penjelasan di atas maka hipotesis berikut ini.

H2: Transparansi berpengaruh positif terhadap laporan keuangan BUMDES

Pengaruh Responsibilitas terhadap laporan keuangan BUMDES

Responsibilitas subjektif lebih mengedepankan nilai-nilai etis dan kemanusiaan yang terangkum dalam *equity* (hak menurut keadilan/kewajaran), *equality* (persamaan hak), *fairness* (kejujuran) untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tugas administrasi lainnya. Dwiyanto menyatakan responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Sembiring menyatakan bahwa, responsibilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa proses pemberian pelayanan publik itu dilakukan dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Kinerja yang baik akan menghasilkan pelayanan yang berkualitas sehingga dalam mengukur kinerja maka dinilai dari kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur. Responsibilitas merupakan pengejawantahan tanggungjawab organisasi sebagai anggota masyarakat dalam mematuhi hukum dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat. Disini suatu organisasi harus mampu berperilaku atau bertindak sebagai warga korporasi yang baik. Berdasarkan

⁸ Loina Lalolo Krina, *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas: Transparansi & Partisipasi* (Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2013).

penelitian yang dilakukan Helaluddin & Wijaya menunjukkan bahwa tanggung jawab berpengaruh positif terhadap penyajian laporan keuangan.

Menurut penjelasan di atas maka hipotesis berikut ini.

H3: Tanggung jawab berpengaruh positif terhadap laporan keuangan BUMDES

Pengaruh Profesionalisme terhadap laporan keuangan BUMDES

SDM merupakan modal dan kekayaan yang terpenting bagi sebuah organisasi. Waktu, tenaga, dan kemampuan seseorang yang kompeten benar-benar dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan organisasi, maupun bagi kepentingan individu. Semua potensi SDM sangat berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam mencapai tujuannya, untuk itu peran SDM yang kompeten sangat diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Menurut Sedarmayanti, profesionalisme adalah pilar yang akan menempatkan birokrasi sebagai mesin efektif bagi pemerintah dan sebagai parameter kecakapan aparatur dalam bekerja secara baik. Sikap profesionalisme sangat berperan penting dalam pemeriksaan laporan keuangan. Profesionalisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kualitas, mutu dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi. Kajian mengenai profesionalisme ini menitikberatkan pada cerminan tingkah laku seseorang dalam bertindak dan berperilaku sesuai dengan etika. Kecermatan dan keseksamaan dalam penggunaan kemahiran profesional menuntut auditor untuk melaksanakan professional scepticism yaitu sikap auditor yang berpikir kritis terhadap bukti audit dengan selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi terhadap bukti. Penelitian Mahardika dkk, menunjukkan hasil bahwa profesionalisme berpengaruh terhadap laporan keuangan.

Menurut penjelasan di atas maka hipotesis berikut ini.

H4: Profesionalisme berpengaruh positif terhadap laporan keuangan BUMDES

Pengaruh *Rule of Law* terhadap laporan keuangan BUMDES

Rule of law atau aturan hukum pada hakekatnya adalah memposisikan hukum sebagai landasan bertindak dari seluruh elemen bangsa dalam sebuah negara. Menurut Hartono menyebut inti pengertian *rule of law* adalah jaminan apa yang disebut sebagai keadilan sosial. Menurut Sumantri Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau undang-undang, adanya jaminan terhadap hak azasi manusia (warga negara), adanya pembagian kekuasaan dan adanya pengawasan dari badan-badan peradilan. Terdapat 3 (tiga) unsur yang harus mendapat perhatian yang sama pada implementasi penegakan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan atau hasil guna dan kepastian hukum. Pemerintah berkewajiban memastikan *rule of law* optimal dalam segala aspek dan menjamin keberlangsungannya dengan 1. Adanya penegakan hukum secara utuh dalam berbagai aspek pemerintahan daerah 2. Adanya peraturan hukum serta undang-undang yang jelas dan tegas serta yang mengikat seluruh aparat pemerintahan daerah tanpa terkecuali 3. Adanya lembaga peradilan dan hukum yang kredibel dan bebas KKN 4. Melaksanakan kebijakan dan pelayanan publik berdasarkan hukum

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku 5. Mengimplementasikan rancangan dan ketetapan semua produk hukum sesuai kaidah regulatory practice principle 6. Melakukan rancangan perundangundangan berdasarkan analisis kebijakan yang holistic dan sistemik. Penelitian yang dilakukan oleh Pribadi dan Purboraras yang juga menyatakan bahwa kepatuhan akan peraturan Undang-Undang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Menurut penjelasan di atas maka hipotesis berikut ini.

H5: Rule of law berpengaruh positif terhadap laporan keuangan BUMDES

METODE PENELITIAN

Populasi untuk penelitian ini yaitu BUMDes yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi. Pada penelitian ini memakai metode penentuan sampel yaitu berupa *Purposive Sampling*, penelitian ini meneliti 65 BUMDes. Kriteria berikut berlaku: 1)Ketua/Pimpinan BUMDES di Kabupaten Kuantan Singingi. 2)Kepala bidang keuangan BUMDES di Kabupaten Kuantan Singingi karena kepala bidang yang bertanggung jawab dalam penyusunan dan melaksanakan rancangan anggaran. 3)Bendahara pengeluaran karena menyimpan, menyetor ke rekening kas umum daerah dan menatausahakan anggaran. Sehingga jumlah yang digunakan dalam penelitian 195 responden. Alat analisa menggunakan regresi linier berganda.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Laporan keuangan BUMDes (Y) merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksitransaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Indikator variabel penyajian laporan keuangan yang dikembangkan oleh Sande diukur dengan indikator : 1.Laporan keuangan disusun secara lengkap, 2. laporan keuangan diselesaikan tepat waktu, 3. Informasi yang disajikan menggambarkan transaksi secara jujur, 4. laporan keuangan yang diperiksa kembali oleh pihak lain menunjukkan hasil yang tidak terlalu berbeda jauh, 5. informasi yang dimuatkan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya. 6. Laporan keuangan dijadikan sesuai tolak ukur untuk tahun berikutnya. 7. Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan bebas dari kesalahan yang bersifat material, 8. Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan memenuhi kebutuhan untuk para pengguna laporan keuangan.

Akuntabilitas Menurut Hasniati⁹ dapat dimaknai sebagai perwujudan kewajiban aparat pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan Dana Desa dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan agar dilaksanakan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Indikator akuntabilitas menurut Wardani sebagai berikut: 1. Proses laporan pelaksanaan rapat rencana penggunaan dan rencana kegiatan dana desa, 2.

⁹ Hasniati, "Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa," *Jurnal Analisis dan Pelayanan Publik Universitas Hassanuddin* 2, no. 1 (2016).

Proses keterlibatan tim pelaksana dalam pelaksanaan penggunaan dana desa, 3. Proses keterlibatan tim pelaksana dalam pengawasan penggunaan dana desa, 4. bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan dan realisasi dari dana desa yang telah dipergunakan.

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Indikator transparansi: 1. Proses perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa beserta masyarakat desa mengenai kegiatan pelaksanaan yang akan dilakukan. 2. proses pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa mengenai keterbukaan informasi terkait proses pelaksanaan kegiatan serta partisipasi masyarakat dalam keterlibatan pelaksanaan kegiatan, 3. Proses keterlibatan tim pelaksana dan masyarakat dalam mengawasi program kegiatan, 4. Proses pertanggungjawaban terkait keterbukaan dari setiap kegiatan yang telah berjalan

Responsibilitas Menurut Azhery adalah hal yang dipertanggung jawabkan atas suatu kewajiban dan termasuk putusan, keahlian, kemampuan, dan kecakapan. Indikator Responsibilitas: 1. Kejelasan tanggung jawab dan wewenang, 2. Memiliki komitmen dalam melaksanakan tanggung jawab dan wewenang, 3. Memiliki kebijakan dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia, 4. Kebijakan dalam pengelolaan sarana dan prasarana, 5. Kemampuan dalam metode kerja.

Profesionalisme Profesionalisme merupakan sikap seseorang yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan dengan baik serta dilandasi dengan tingkat pengetahuan yang memadai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan bidangnya. Indikator Profesionalisme Siagian: 1. Kemampuan, 2. Kualitas, 3. Sarana dan prasarana, 4. Jumlah sumber daya manusia, 5. Teknologi informasi, 6. keandalan.

Rule of Law Menurut Sumantri Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau perundang-undangan, adanya jaminan terhadap hak azasi manusia (warga negara), adanya pembagian kekuasaan dan adanya pengawasan dari badan-badan peradilan. Indikator Rule Of Law : 1. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha bumdes setiap bulan, 2. Membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha bumdes setiap bulan, 3. Memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha bumdes kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 tahun.

Analisis data diantaranya yaitu, statistic deskriptif. Pengujian kualitas data diantaranya yaitu uji validitas, uji reabilitas. Pengujian asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas pengujian hipotesis berupa uji t, uji f dan Koefisien Determinasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas Data

**Tabel 1: Hasil Uji Normalitas Data
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		177
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	4,26376626
	Most Extreme Differences	
	Absolute	0.062
	Positive	0.028
	Negative	-0.062
Test Statistic		0.062
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.093

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data dari output SPSS (2023)

Berlandaskan pada tabel 1 uji normalitas diatas disimpulkan yaitu diperoleh nilai signifikansi unstandarlized residual atau Asymp.Sig. (2-tailed) sebesar 0,093 lebih besar dari 0,05. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa nilai residual terdistribusi normal karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, maka hasil penelitian ini dinyatakan dapat diterima karena data yang dianalisis telah memenuhi kriteria uji normalitas.

Uji Validitas Data

Tabel 2: Hasil Uji Validitas Data

Y			
Item	Corrected Item - Total Correlation	R tabel	Keterangan
Y1	0,743	0,1476	Valid
Y2	0,753	0,1476	Valid
Y3	0,739	0,1476	Valid
Y4	0,831	0,1476	Valid
Y5	0,823	0,1476	Valid
Y6	0,827	0,1476	Valid
Y7	0,780	0,1476	Valid
Y8	0,783	0,1476	Valid
Y9	0,796	0,1476	Valid
Y10	0,743	0,1476	Valid
X1			

Item	Corrected Item – Total Correlation	R tabel	Keterangan
X1.1	0,772	0,1476	Valid
X1.2	0,785	0,1476	Valid
X1.3	0,833	0,1476	Valid
X1.4	0,874	0,1476	Valid
X1.5	0,879	0,1476	Valid
X1.6	0,840	0,1476	Valid
X1.7	0,871	0,1476	Valid
X1.8	0,871	0,1476	Valid
X1.9	0,782	0,1476	Valid
X1.10	0,781	0,1476	Valid
X2			
Item	Corrected Item – Total Correlation	R tabel	Keterangan
X2.1	0,793	0,1476	Valid
X2.2	0,815	0,1476	Valid
X2.3	0,811	0,1476	Valid
X2.4	0,821	0,1476	Valid
X2.5	0,834	0,1476	Valid
X2.6	0,868	0,1476	Valid
X2.7	0,876	0,1476	Valid
X2.8	0,865	0,1476	Valid
X2.9	0,844	0,1476	Valid
X2.10	0,780	0,1476	Valid
X3			
Item	Corrected Item – Total Correlation	R tabel	Keterangan
X3.1	0,786	0,1476	Valid
X3.2	0,719	0,1476	Valid
X3.3	0,835	0,1476	Valid
X3.4	0,865	0,1476	Valid
X3.5	0,832	0,1476	Valid
X3.6	0,754	0,1476	Valid
X3.7	0,876	0,1476	Valid
X3.8	0,813	0,1476	Valid
X3.9	0,802	0,1476	Valid
X3.10	0,812	0,1476	Valid
X4			
Item	Corrected Item – Total Correlation	R tabel	Keterangan
X4.1	0,709	0,1476	Valid
X4.2	0,728	0,1476	Valid

X4.3	0,688	0,1476	Valid
X4.4	0,689	0,1476	Valid
X4.5	0,801	0,1476	Valid
X4.6	0,778	0,1476	Valid
X4.7	0,806	0,1476	Valid
X4.8	0,829	0,1476	Valid
X4.9	0,781	0,1476	Valid
X4.10	0,713	0,1476	Valid
X5			
Item	Corrected Item – Total Correlation	R tabel	Keterangan
X5.1	0,701	0,1476	Valid
X5.2	0,690	0,1476	Valid
X5.3	0,746	0,1476	Valid
X5.4	0,680	0,1476	Valid
X5.5	0,791	0,1476	Valid
X5.6	0,778	0,1476	Valid
X5.7	0,792	0,1476	Valid
X5.8	0,761	0,1476	Valid
X5.9	0,682	0,1476	Valid
X5.10	0,575	0,1476	Valid

Sumber: Data dari output SPSS (2023).

Menurut uji validitas data yang terdapat dalam tabel 2 menunjukkan bahwa seluruh pernyataan untuk setiap variabel dalam kuesioner adalah valid. Hal ini dibuktikan dengan nilai Corrected Item-Total Correlation > 0,1476. Sesuai dengan tujuan dilakukannya uji validitas adalah untuk melihat seberapa besar kemampuan pernyataan dapat mengetahui jawaban responden. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan yang diajukan oleh peneliti dalam kuesioner yang dibagikan kepada responden, dapat dijadikan alat ukur yang tepat $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka pernyataan tersebut dikatakan valid.

Uji Reliabilitas

Tabel 3: Hasil Uji Reliabilitas

Item	Cronbach's Alpha
Akuntabilitas (X1)	0.949
Transparansi (X2)	0.950
Responsibilitas (X3)	0.940
Profesionalisme (X4)	0.914
Rule of Law (X5)	0,895
Laporan Keuangan BUMDES (Y)	0,929

Sumber: Data dari output SPSS (2023)

Berdasarkan tabel 3 diatas mengenai uji reliabilitas pada kuesioner penelitian. Dapat diketahui bahwa berdasarkan hasil uji reliabilitas di atas menunjukkan bahwa instrumen menunjukkan tingkat reliabilitas yang tinggi, hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien alpha > 0,60, jadi hasil ukur yang akan didapatkan dapat dipercaya.

Hasil Uji Multikolinearitas

Tabel 4: Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 Akuntabilitas (X1)	0,362	2,766
Transparansi (X2)	0,404	2,478
Responsibilitas (X3)	0,421	2,377
Profesionalisme (X4)	0,645	1,552
Rule of Law (X5)	0,463	2,160

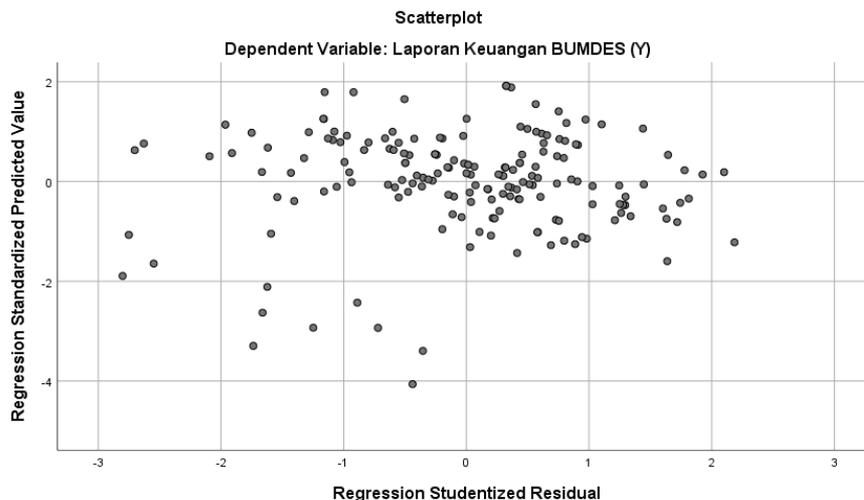
a. Dependent Variable: Laporan Keuangan BUMDES (Y)

Sumber: Data dari output SPSS (2023).

Pada tabel 4 uji multikolinearitas maka dapat disimpulkan model regresi tidak terjadi masalah multikolinearitas. Hal ini dapat dilihat nilai VIF dari < 10, sedangkan nilai *tolerance* > 0,1. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5: Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Data Output SPSS (2023)

Dari gambar 5.2 dapat dilihat bahwa hasil pengujian heteroskedastisitas pada tampilan *scatterplot* dari variable dependen menunjukkan titik-titik menyebar diatas dan dibawah pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini telah terbebas dari heteroskedastisitas.

Hasil Uji Simultan (Uji F)

Tabel 6: Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	5300,926	5	1060,185	56,660	0.000
Residual	3199,628	171	18,711		
Total	8500,554	176			

a. Predictors: (Constant), Rule of Law (X5), Profesionalisme (X4), Responsibilitas (X3), Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2)

b. Dependent Variable: Laporan Keuangan BUMDES (Y)

Sumber: Data dari output SPSS (2023)

Berdasarkan output diatas diketahui bahwa F hitung (56,660 > F tabel (2,27) dengan nilai Sig. (0,000) pada $\alpha = 5\%$. Ini berarti bahwa variabel Rule of Law (X5), Responsibilitas (X3), Profesionalisme (X4), Transparansi (X2), Akuntabilitas (X1) secara simultan mempengaruhi variabe Laporan Keuangan BUMDes. Dengan demikian maka hipotesis dalam penelitian ini diterima

Hasil Koefisien Determinasi (Adj R²)

Tabel 7: Hasil (Adj R²)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,790	0,624	0,613	4,32565

a. Predictors: (Constant), Rule of Law (X5), Profesionalisme (X4), Responsibilitas (X3), Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2)

b. Dependent Variable: Laporan Keuangan BUMDES (Y)

Sumber: Data dari output SPSS (2023)

Uji koefisiensi determinasi dapat dilihat pada tabel 7 maka menunjukkan bahwa nilai R Square adalah sebesar 0,624 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Y dapat dijelaskan oleh X1,X2,X3,X4 dan X5 sebesar 62,5 % sedangkan sisanya 37,5 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.

Hasil Regresi Linear Berganda

Tabel 8: Hasil Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3,520	2,199		1,601	0,111
Akuntabilitas (X1)	0,200	0,069	0,228	2,923	0,004
Transparansi (X2)	0,176	0,065	0,199	2,690	0,008
Responsibilitas (X3)	0,200	0,064	0,226	3,121	0,002
Profesionalisme (X4)	0,141	0,058	0,142	2,422	0,016
Rule of Law (X5)	0,185	0,072	0,178	2,581	0,011

a. Dependent Variable: Laporan Keuangan BUMDES (Y)

Sumber: Data dari output SPSS (2023).

Berlandaskan pada tabel 8 di atas persamaan regresi yang diperoleh yaitu:

$$Y = 3,520 + 0,200 X1 + 0,176 X2 + 0,200 X3 + 0,141 X4 + 0,185 X5 + e$$

Hasil Uji Parsial (Uji t)

Tabel 9: Hasil (Uji t)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3,520	2,199		1,601	0,111
Akuntabilitas (X1)	0,200	0,069	0,228	2,923	0,004
Transparansi (X2)	0,176	0,065	0,199	2,690	0,008
Responsibilitas (X3)	0,200	0,064	0,226	3,121	0,002
Profesionalisme (X4)	0,141	0,058	0,142	2,422	0,016
Rule of Law (X5)	0,185	0,072	0,178	2,581	0,011

a. Dependent Variable: Laporan Keuangan BUMDES (Y)

Sumber: Data dari output SPSS (2023).

Pada Tabel 9 di atas bisa dilihat hasil hipotesis sebagai berikut.

1. Dari perhitungan diatas diperoleh nilai signifikansi X1 sebesar $0,004 \leq 0,05$ dengan t hitung sebesar $2,923 > t$ tabel 1,9739. Dengan demikian

- hipotesis 1 yang dirumuskan diterima dengan hasil X1 berpengaruh signifikan terhadap Y .
2. Dari perhitungan diatas diperoleh Nilai signifikansi X2 sebesar $0,008 > 0,05$ dengan t hitung sebesar $2,690 < t$ tabel $1,9739$. Dengan demikian hipotesis 2 yang dirumuskan diterima dengan hasil X2 berpengaruh terhadap Y.
 3. Dari perhitungan diatas diperoleh nilai signifikansi X3 sebesar $0,002 \leq 0,05$ dengan t hitung sebesar $3,121 > t$ tabel $1,9739$. Dengan demikian hipotesis 3 yang dirumuskan diterima dengan hasil X3 berpengaruh signifikan terhadap Y
 4. Dari perhitungan diatas diperoleh nilai Nilai signifikansi X4 sebesar $0,016 \leq 0,05$ dengan t hitung sebesar $2,422 > t$ tabel $1,9739$. Dengan demikian hipotesis 4 yang dirumuskan diterima dengan hasil X4 berpengaruh signifikan terhadap Y
 5. Nilai signifikansi X5 sebesar $0,011 \leq 0,05$ dengan t hitung sebesar $2,581 > t$ tabel $1,9739$. Dengan demikian hipotesis 5 yang dirumuskan diterima dengan hasil X5 berpengaruh signifikan terhadap Y

PEMBAHASAN

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Laporan Keuangan BUMDes

Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Laporan Keuangan BUMDes. Hasil dapat diartikan yaitu dalam penerapan akuntabilitas bumdes memberikan pengelolaan keuangan yang disajikan secara terbuka, cepat, dan tepat. Maka akan meningkatkan kinerja pemerintah dalam pengelolaan laporan keuangan sehingga sasaran pemerintah untuk melaporkan hasil laporan keuangan yang baik tercapai. Menurut Wicaksono menjelaskan hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (principals) memperkerjakan orang lain (agents) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agents tersebut. Konflik keagenan tersebut bisa diatasi dengan adanya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan alokasi dana desa dikarenakan semua aktivitas agen dalam hal ini perangkat desa dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak pemberi amanah (principals) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Ismail yang menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan anggaran BUMDes. Pemerintah desa sudah menerapkan aspek akuntabilitas dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban BUMDes sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas merupakan suatu hal yang sangat penting dilakukan oleh pemerintah desa dan pengelolah BUMDes dalam pengelolaan anggaran BUMDes. Namun penelitian Anggraini menjelaskan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pengelolaan anggaran BUMDes.

Pengaruh Transparansi terhadap Laporan Keuangan BUMDes

Transparansi berpengaruh positif terhadap Laporan Keuangan BUMDes. Sesuai dengan prinsip transparansi pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan non keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Semakin tinggi tingkat transparansi yang diterapkan, maka akan semakin tinggi pula tingkat ketaatan dan menghasilkan kinerja yang baik dan efektif. Transparansi menurut Krina¹⁰ adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Stiglitz menyatakan bahwa transparansi merupakan hak asasi setiap manusia. Dalam hal ini BUMDes juga harus transparan dalam mengelola usaha desa tersebut, baik dalam penyediaan informasi, laporan keuangan dirancang untuk menginformasikan status keuangan, realisasi anggaran, arus kas serta kerja keuangan entitas pelapor yang bermanfaat bagi masyarakat Desa.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian penelitian Irawati & Martanti yang menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan laporan keuangan. Pengelolaan laporan keuangan ini sangat menentukan seberapa besar informasi yang ada didalam laporan keuangan yang sangat diperlukan untuk mencerminkan suatu kondisi suatu instansi. Kondisi yang digambarkan dalam laporan keuangan mengidentifikasi pengeluaran dan pemasukan selama periode tertentu, pengidentifikasi ini dapat digunakan dalam pengambilan keputusan yang akan menunjang kondisi keuangan suatu instansi. Namun penelitian Ismail menunjukkan bahwa variabel independen transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan BUMDes.

Pengaruh Responsibilitas terhadap Laporan Keuangan BUMDes

Responsibilitas berpengaruh positif terhadap Laporan Keuangan BUMDes. Adanya hasil tersebut merupakan dengan pemerintah merespon secara cepat agar tidak tertinggal dalam menjalankan tugas dan fungsinya, maka tingginya tingkat *responsive* dari pihak organisasi akan menimbulkan sifat percaya dari pihak eksternal (masyarakat). Sembiring menyatakan bahwa, responsibilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa proses pemberian pelayanan publik itu dilakukan dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga adanya tindakan responsivitas yang baik menghasilkan hubungan komunikasi yang baik antara BUMDes dan pihak masyarakat. Responsibilitas subjektif lebih mengedepankan nilai-nilai etis dan kemanusiaan yang terangkum dalam *equity* (hak menurut keadilan/kewajaran), *equality* (persamaan hak), *fairness* (kejujuran) untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tugas administrasi lainnya.

¹⁰ Krina, *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas: Transparansi & Partisipasi*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Utama & Setiyani, Abdullah, Helaluddin & Wijaya yang menunjukkan bahwa tanggungjawab berpengaruh terhadap kinerja BUMDes. Penerapan prinsip tanggungjawab dalam pemerintahan sangatlah penting untuk mengukur sejauh mana organisasi bertanggungjawab penuh atas pengelolaan laporan keuangan, agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akhirnya akan mampu mendorong terwujudnya peningkatan kinerja pemerintahan. Namun penelitian Abdullah menunjukkan bahwa tanggungjawab tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan.

Pengaruh Profesionalisme terhadap Laporan Keuangan BUMDes

Profesionalisme berpengaruh positif terhadap Laporan Keuangan BUMDes. Hasil dapat diartikan yaitu dengan memberikan waktu, tenaga, dan kemampuan seseorang yang kompeten benar-benar dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan organisasi, maupun bagi kepentingan individu, maka semua potensi SDM akan membantu organisasi mencapai tujuannya, sehingga semakin tinggi kompetensi SDM dalam pemerintah, maka akan semakin baik laporan keuangan organisasi. Menurut Sedarmayanti, profesionalisme adalah pilar yang akan menempatkan birokrasi sebagai mesin efektif bagi pemerintah dan sebagai parameter kecakapan aparatur dalam bekerja secara baik. Ukuran profesionalisme adalah kompetensi, efektivitas, dan efisiensi serta bertanggung jawab. Sikap profesionalisme sangat berperan penting dalam pemeriksaan laporan keuangan. Kajian mengenai profesionalisme ini menitikberatkan pada cerminan tingkah laku seseorang dalam bertindak dan berperilaku sesuai dengan etika.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Dewi dkk yang menunjukkan bahwa profesionalisme berpengaruh terhadap kinerja BUMDes. Sikap profesionalisme sangat berperan penting dalam pemeriksaan laporan keuangan. Kajian mengenai profesionalisme ini menitikberatkan pada cerminan tingkah laku seseorang dalam bertindak dan berperilaku sesuai dengan etika. Namun penelitian Agusti & Pertiwi menunjukkan bahwa profesionalisme tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Pengaruh *Rule of Law* terhadap Laporan Keuangan BUMDes

Rule of Law berpengaruh positif terhadap Laporan Keuangan BUMDes. Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah disajikan dalam Laporan Keuangan, maka keberadaan hukum (*rule of law*) didalam organisasi seperti BUMDes dapat membantu pengelola dalam laporan keuangan dan fungsi secara mudah karena adanya aturan yang jelas, maka adanya *rule of law* dapat mengarahkan tugas dan fungsi pemerintahan secara teratur dan terorganisir dengan baik. Menurut Raharjo, *rule of law* atau aturan hukum pada hakekatnya adalah memosisikan hukum sebagai landasan bertindak dari seluruh elemen bangsa dalam sebuah negara. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya pemerintah mengacu pada aturan hukum atau perundang-undangan. Menurut

Sumantri Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau perundang-undangan, adanya jaminan terhadap hak azasi manusia (warga negara), adanya pembagian kekuasaan dan adanya pengawasan dari badan-badan peradilan. Setiap lembaga pemerintah dan lembaga lainnya yang ada didalam negara tersebut dalam menjalankan tugasnya harus dilandasi hukum dan dapat di pertanggung jawabkan secara hukum.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sofyani dkk, yang menyatakan bahwa prinsip *rule of law* berpengaruh kinerja BUMDes. Pemerintah Desa harus memastikan program BUMDes telah sesuai dengan *rule of law* yang berlaku. Jika tidak ada Perdes dan AD/ART BUMDes tidak mungkin bisa jalan. Namun penelitian Azmal yang menyatakan bahwa prinsip *rule of law* tidak berpengaruh terhadap kinerja BUMDes

KESIMPULAN

Akuntabilitas Berpengaruh positif terhadap Laporan Keuangan BUMDes, karena dalam penerapan akuntabilitas bumdes memberikan pengelolaan keuangan yang disajikan secara terbuka, cepat, dan tepat. sehingga sasaran pemerintah untuk melaporkan hasil laporan keuangan yang baik tercapai. Transparansi Berpengaruh positif terhadap Laporan Keuangan BUMDes, karena dengan mampu menyediakan informasi yang di perlukan masyarakat secara relevan, akurat, tepat waktu dan dapat dipercaya, maka menghasilkan kinerja yang baik dan efektif. Responsibilitas Berpengaruh positif terhadap Laporan Keuangan BUMDes, karena tingginya tingkat responsive dari pihak organisasi akan menimbulkan sifat percaya dari pihak eksternal (masyarakat). Profesionalisme Berpengaruh positif terhadap Laporan Keuangan BUMDes, karena sikap profesionalisme sangat berperan penting dalam pemeriksaan laporan keuangan. Dengan adanya profesinalisme, dapat memberikan waktu, tenaga, dan kemampuan seseorang yang kompeten benar-benar dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan organisasi, maupun bagi kepentingan individu, maka semua potensi SDM akan membantu organisasi mencapai tujuannya. Rule Of Law Berpengaruh positif terhadap Laporan Keuangan BUMDes, karena keberadaan hukum (*rule of law*) didalam organisasi seperti BUMDes dapat membantu pengelola dalam menjalankan tugas dan fungsi secara mudah karena adanya aturan yang jelas, maka adanya *rule of law* dapat mengarahkan tugas dan fungsi pemerintahan secara teratur dan terorganisir dengan baik.

Saran

Perlunya sosialisasi kepada masyarakat desa terkait tujuan BUMDes agar masyarakat desa lebih berpartisipasi dalam mengembangkan BUMDes dan tercapainya tujuan BUMDes. Selanjutnya, diharapkan adanya pelatihan rutin yang diberikan kepada para pengelola BUMDes sehingga dapat mengelola BUMDes sesuai dengan pengetahuan dan pelatihan yang diberikan. Serta, bagi peneliti selanjutnya, hendaknya perlu dilakukan pengkajian dengan cara

memperdalam atau mengembangkan variabel penelitian dan memperbanyak sampel penelitian sehingga dapat diperoleh temuan lainnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Keterbatasan

Penelitian ini mempunyai sejumlah keterbatasan, pertama yaitu lokasi BUMDes yang jauh menyebabkan komunikasi antara peneliti dan responden terbatas sehingga peneliti sulit dalam bertemu langsung dengan pengelola BUMDes dan selain itu beberapa desa juga melakukan pembatasan akses di beberapa desa karena adanya pandemi COVID-19. Kedua, objek penelitian hanya di fokuskan pada prinsip-prinsip tata kelola yang mana sebenarnya masih bisa dikembangkan lagi faktor yang mempengaruhi laporan keuangan BUMDes. Ketiga, peneliti sulit mendapatkan data kuisisioner dikarenakan adanya responden yang tidak mau merespon dan tidak memiliki HP/jaringan yang mendukung untuk pengisian kuisisioner. Serta beberapa responden tidak bersedia untuk mengisi kuisisioner dikarenakan adanya kesibukan rapat dan kesibukan pergantian kepengurusan BUMDes.

Implikasi

Implikasi dari hasil penelitian mencakup dua hal, yaitu implikasi teoritis dan implikasi praktis:

1. Implikasi Teoritis:

Penelitian ini diharapkan menambah informasi serta pengetahuan mengenai pengaruh akuntabilitas, transparansi, responsibilitas, profesionalisme dan *rule of law* terhadap kinerja BUMDes. Dalam penelitian sebelumnya ditemukan masih banyak ketidakkonsistenan hasil sehingga penelitian selanjutnya dapat menjadikan penelitian ini sebagai acuan.

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini memberikan implikasi pada BUMDes khususnya di Kabupaten Kuantan Singingi sehingga diharapkan kepada aparat Desa untuk meningkatkan tata kelola publik dalam pengelolaan BUMDes. Peningkatan kualitas laporan keuangan dapat ditinjau melalui prinsip – prinsip tata kelola yang baik. Dengan menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, responsibilitas, profesionalisme dan *rule of law* dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah melalui tingkat penerapan sistem akuntansi keuangan daerah. Sehingga melalui penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang cukup kuat dalam penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, responsibilitas, profesionalisme dan *rule of law* terhadap laporan keuangan BUMDes.

REFERENSI

Abdullah, Muhammad Ilyas. “Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Responsibilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah Serta Dampak Terhadap Kinerja Guru Pada Madrasah Tsanawiyah Muqimius Sunnah Palembang.”

- Thesis, Universitas Tridianti Palembang, 2020. <http://repository.univ-tridianti.ac.id/id/eprint/1135>
- Agusti, Restu, and Nastia Putri Pertiwi. "Pengaruh Kompetensi, Independensi Dan Profesionalisme Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik Se Sumatera)." *Jurnal Ekonomi* 21, no. 3 (2013).
- Anggraini, Desi. "Pengaruh Akuntabilitas Tranparansi Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Dengan Konsep Value For Money Pada Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Klaten." Skripsi, UPN Veteran Yogyakarta, 2020. <http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/26113>
- Azhery. *Akuntansi Sektor Publik*. 2nd ed. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2013.
- Azmal, Erian. "Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Good Governance Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat." Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2018.
- Diamond, Hendry. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Donaldson, Lex, and James H. Davis. "Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns." *Australian Journal of Management* 16, no. 1 (June 22, 1991): 49–64. <http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/031289629101600103>.
- Dwiyanto, Agus. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: UGM Press, 2018.
- Fadil, Sidratul. "Pengaruh Akuntabilitas Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Bumdes Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Nagari." Thesis, Universitas Jambi, 2021.
- Halim, Abdul. *Teori Ekonomi Makro*. 3rd ed. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018.
- Hartono. *Program Legislasi Nasional Antara Kenyataan Dan Harapan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2016.
- Helaluddin, and Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray Makassar, 2019.
- Irawati, Dina, and Diana Elvianita Martanti. "Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan BUM Desa Terhadap Pelaporan Aset Desa (Studi Fenomenologi Pada BUM Desa Desa Karangbendo Kec Ponggok Kab Blitar)." Skripsi, Universitas Jember, 2017.
- Ismail, Ahyar, Antong, and Ahmad Suhardi. "Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Anggaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kabupaten Luwu." *Jurnal Manajemen* 5, no. 8 (2020): 23–45.
- Jensen, M. C., and W. H. Meckling. "Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure." *Journal of Financial Economics* 3, no. 4 (1976): 305–360.
- Kusumawati, Lanny. *Pengantar Hukum Waris Perdata Barat: Pewarisan Menurut*

- Undang-Undang*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. 2nd ed. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012.
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. 5th ed. Yogyakarta: Andi Offset, 2012.
- Maslika, Ana Sopanah, and Hartini Prasetyaning Prawestri. "Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Tamanharjo Bersinar Kecamatan Singosari Kabupaten Malang." *Conference on Economic and Business Innovation* 1, no. 1 (2021): 174–190.
- Prabhawa, I Ketut Ardy, Nyoman Trisna Herawati, and I Made Pradana Adiputra. "Pengaruh Supervisi, Profesionalisme, Dan Komunikasi Dalam Tim Pada Kinerja Auditor Perwakilan Bpkp Provinsi Bali." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi* 2, no. 1 (2014).
- Raharjo. *Akuntansi Sektor Publik: Konsep & Teori*. Jakarta: Bumi Metro Ray, 2014.
- Renyowijoyo, Muindro. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013.
- Riyadi, Slamet, and Agung Yulianto. "Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing to Deposit Ratio (FDR) Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia." *Accounting Analysis Journal* 3, no. 4 (2014).
- Sabeni, Arifin, and Imam Ghozali. *Pokok-Pokok Akuntansi Pemerintahan*. 4th ed. Yogyakarta: BPFE, 2013.
- Sande, Peggy. "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat)." *Jurnal Akuntansi* 1, no. 1 (2013).
- Savitri, Enni, Andreas Andreas, and Volta Diyanto. "Accountability of Village Funds Management." *Jurnal Aplikasi Manajemen* 17, no. 3 (September 1, 2019): 515–521.
- Savitri, Enni, Andreas, and Volta Diyanto. "Pendampingan Pelaporan Keuangan BUMDes Berbasis WEB." *Journal of Community Engagement Research for Sustainability* 2, no. 6 (2022): 268–277. <https://doi.org/10.31258/cers.2.5.268-277>
- Sedarmayanti. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah: Upaya Membangun Organisasi Efektif Dan Efesien Melalui Restrukturisasi Dan Pemberdayaan*. Bandung: Mandar Maju, 2015.
- Sembiring, Masana. *Budaya & Kinerja Organisasi: Perspektif Organisasi Pemerintah*. Bandung: Fokus Media, 2012.
- Siagian, Sondang P. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Sofyani, Hafiez, and Afrizal Tahar. "Peran Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Indonesia Terhadap Kepercayaan Masyarakat Desa Di

- Kabupaten Bantul.” *Jurnal Akademi Akuntansi* 4, no. 1 (June 26, 2021): 1–16. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jaa/article/view/16481>.
- Stiglitz, Joseph E. *Economics of the Public Sector*. New York: Mc Graw Hill, 2000.
- Sumantri, Sri. *Prosedur Dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Bandung: Alumni, 2012.
- Ultafiah, Weny. “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance Pada Desa Di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat.” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2017.
- Umami, Risya. “Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi, Jurnal Akuntansi, Pajak dan Manajemen* 6, no. 11 (2017): 74–80.
- Utama, Daniel Aditya, and Rediana Setiyani. “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Responsibilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah Terhadap Kinerja Guru.” *Dinamika Pendidikan Unnes* 9, no. 2 (2014): 100–114. <https://doi.org/10.15294/dp.v9i2.4886>
- Wandika, Rentno Dwi. “Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintah Desa (Studi Kasus Di Desa Pangungasri, Desa Bumiayu, Dan Desa Sumberagung Kecamatan Pangungrejo Kabupaten Blitar).” Skripsi, Universitas Islam Malang, 2021.
- Wardani, Vina Kusuma. “The Effect of Fundamental Factor to Dividend Policy: Evidence in Indonesia Stock Exchange.” *International Journal of Business and Commerce* 4, no. 20 (2018): 14–25.
- Wicaksono, Kristian Widya. “Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik.” *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik* 19, no. 1 (2015).